

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian suatu negara tidak dapat berkembang tanpa keterlibatan seluruh elemen masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Setiap individu memiliki potensi sumber daya manusia yang dapat dikembangkan agar mampu berperan sebagai tenaga kerja, konsumen hasil pembangunan, serta bagian dari proses pembangunan itu sendiri. Tenaga kerja menjadi elemen krusial dalam pelaksanaan pembangunan, sebab tanpa kontribusi mereka, kegiatan pembangunan tidak akan berjalan maksimal (Abdullah et al., 2024).

Selain lahan, modal, dan keterampilan, tenaga kerja juga menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Jumlah pekerja yang meningkat akan menghasilkan output yang lebih besar. Di sisi lain, pertumbuhan jumlah penduduk dapat memperluas pasar dalam negeri. Berdasarkan teori David Ricardo, tenaga kerja sebagai faktor produksi turut menentukan besarnya output nasional. Oleh karena itu, negara dengan penduduk yang banyak, khususnya negara berkembang, memiliki peluang besar untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonominya (Damanik et al., 2023).

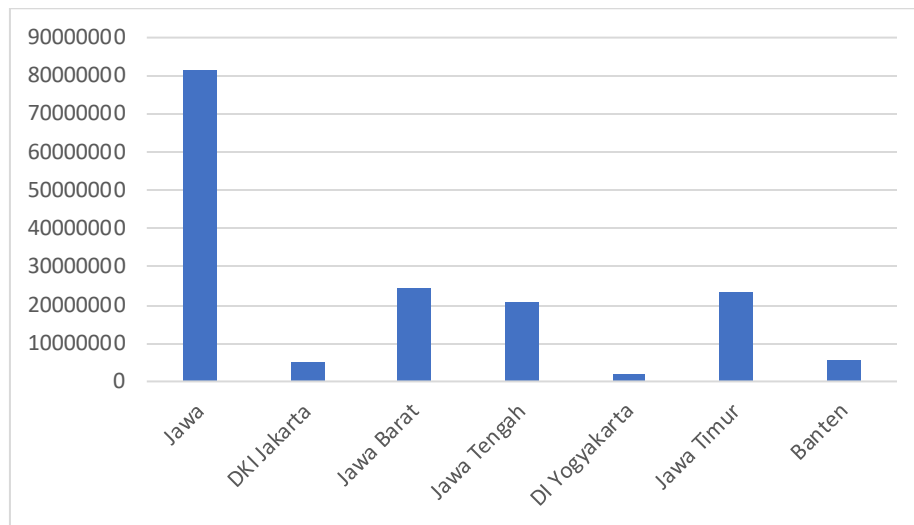
Masalah pembangunan ekonomi sangat erat kaitannya dengan aspek kependudukan, terutama dalam hal ketenagakerjaan. Penyediaan lapangan kerja menjadi salah satu tujuan utama pembangunan agar selaras dengan peningkatan jumlah angkatan kerja. Di negara berkembang, laju pertumbuhan penduduk cenderung tinggi sehingga berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk usia produktif. Apabila pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan ketersediaan

lapangan pekerjaan yang memadai, maka tingkat pengangguran akan meningkat. Kondisi ini menyebabkan proporsi penduduk aktif bekerja menurun dan pada akhirnya dapat menjadi beban bagi pembangunan nasional.

Pulau Jawa merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia dengan penduduk mencapai 157 juta jiwa. Berdasarkan distribusi penduduk per provinsi, dua wilayah dengan jumlah penduduk terendah di Pulau Jawa adalah Daerah Istimewa Yogyakarta dan DKI Jakarta dengan jumlah penduduk masing-masing 3,76 juta jiwa atau 2,4% dan 10,68 juta jiwa atau 6,8% dari penduduk Pulau Jawa. Meskipun memiliki jumlah penduduk lebih rendah dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Jawa, kedua provinsi tersebut memiliki tingkat kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi yang tinggi, terutama DKI Jakarta yang berperan sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian nasional.

Kondisi kependudukan di Pulau Jawa memberikan kontribusi penting terhadap ketersediaan tenaga kerja dan dinamika perekonomian nasional. Jumlah penduduk usia produktif yang besar menjadi potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya pada sektor industri, perdagangan, dan jasa. Namun, apabila perkembangan jumlah penduduk tidak diiringi dengan perluasan lapangan pekerjaan, maka dapat muncul permasalahan seperti pengangguran dan ketimpangan pembangunan antardaerah, sehingga diperlukan kebijakan pemerataan pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar potensi demografis Pulau Jawa mampu mendukung pembangunan ekonomi nasional secara optimal dan berkelanjutan.

Gambar 1. 1 Penduduk Usia Kerja Berdasarkan Provinsi Pulau Jawa 2024 (Jiwa)



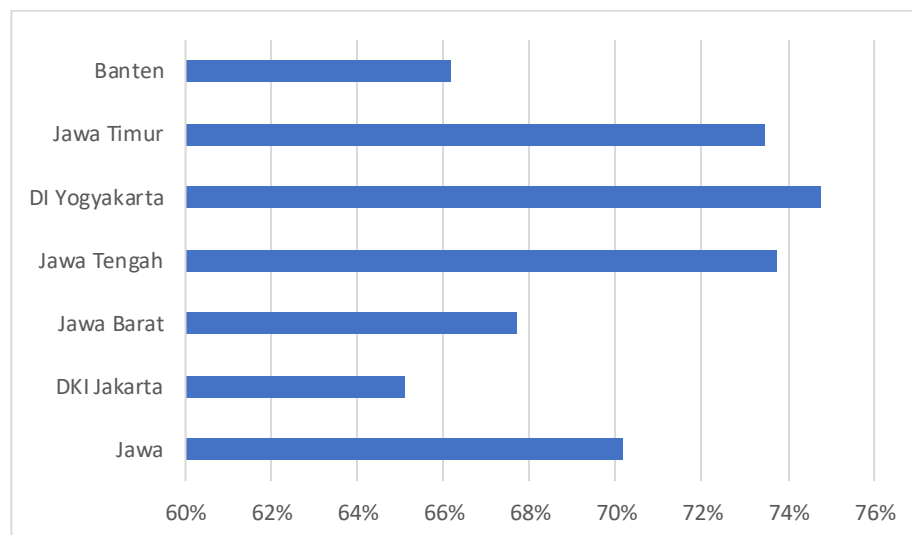
Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024 data diolah

Jumlah penduduk usia kerja Indonesia berdasarkan provinsi di Pulau Jawa tahun 2024 menunjukkan bahwa DKI Jakarta memiliki jumlah penduduk usia kerja yang jauh lebih kecil dibandingkan provinsi lainnya di Jawa, yaitu sekitar 5 juta jiwa dari total sekitar 81 juta jiwa penduduk usia kerja di Pulau Jawa. Hal ini berarti kontribusi DKI Jakarta terhadap total penduduk usia kerja di Pulau Jawa relatif kecil tetapi perannya tetap strategis karena menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian nasional.

Secara umum jumlah penduduk usia kerja di DKI Jakarta berada jauh di bawah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang masing-masing mencapai kisaran 20 sampai 25 juta jiwa. Struktur wilayah yang didominasi kawasan perkotaan membuat penduduk usia kerja di DKI Jakarta menghadapi peluang kerja yang relatif besar di sektor formal terutama jasa dan industri modern. Meskipun secara jumlah lebih sedikit, kepadatan aktivitas ekonomi membuat kebutuhan dan penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta tetap tinggi sehingga produktivitas per tenaga kerja cenderung lebih besar (Astina, 2021).

Sumber daya manusia usia kerja di DKI Jakarta perlu dilibatkan secara optimal dalam pembangunan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja produktif dan perluasan akses kerja yang berkualitas. Semakin banyak penduduk usia kerja yang terserap dalam pasar kerja semakin kuat pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di wilayah ini. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja TPAK menjadi indikator penting untuk menilai seberapa besar penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi dan seberapa efektif tambahan angkatan kerja dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah.

Gambar 1. 2 TPAK (%) Tahun 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024 data diolah

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa adanya permasalahan pada DKI Jakarta, dimana meskipun berada di kawasan Pulau Jawa yang memiliki jumlah penduduk usia kerja tertinggi, namun persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja TPAK DKI Jakarta pada tahun 2024 justru menjadi yang terendah di antara provinsi di Pulau Jawa yaitu sekitar 65%, lebih rendah dibandingkan Banten sekitar 66%, Jawa Barat sekitar 68%, Jawa Timur sekitar 74%, Jawa Tengah sekitar 74%, dan DI

Yogyakarta sekitar 75%, sementara rata-rata TPAK Pulau Jawa hanya sekitar 70% sehingga TPAK DKI Jakarta belum mampu melampaui TPAK Pulau Jawa maupun nasional, yang menandakan bahwa penduduk usia kerja di DKI Jakarta masih banyak yang menganggur atau memilih masuk ke kategori bukan angkatan kerja, sehingga penambahan penduduk tanpa diimbangi peningkatan kualitas sumber daya manusia serta perluasan lapangan pekerjaan berpotensi membebani pembangunan dan menekan pertumbuhan ekonomi, padahal apabila jumlah penduduk usia kerja yang besar tersebut dimanfaatkan secara optimal justru dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 1. 3 TPAK (%) di Wilayah DKI Jakarta Tahun 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024 data diolah

Berdasarkan gambar di atas memperlihatkan bahwa TPAK di DKI Jakarta tahun 2024 menurut wilayah administrasi kota menunjukkan nilai tertinggi berada di Jakarta Utara sekitar 67,5% dan nilai terendah berada di Jakarta Barat sekitar 64,0%. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih belum ada satu pun wilayah di DKI Jakarta yang mampu melampaui rata-rata TPAK Pulau Jawa sebesar 70%, sehingga

mengindikasikan masih adanya penduduk usia kerja yang belum terserap secara optimal dalam pasar kerja.

Perbedaan TPAK antarkota administrasi di DKI Jakarta menggambarkan bahwa pemanfaatan penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi belum merata dan sebagian penduduk masih ber ada dalam kategori bukan angkatan kerja, misalnya karena belum bekerja atau tidak aktif mencari pekerjaan. Keadaan ini berkaitan dengan berbagai faktor yang memengaruhi TPAK, antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat upah, tingkat pendidikan, dan Indeks Pembangunan Manusia, sehingga perbaikan pada faktor-faktor tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi angkatan kerja dan mendorong pembangunan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta secara lebih optimal.

Peran masyarakat dalam angkatan kerja sangat terkait dengan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Pendidikan menjadi faktor penting yang memengaruhi keterlibatan seseorang dalam angkatan kerja. Pendidikan juga berperan besar dalam peningkatan kesejahteraan karena semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh, semakin besar peluang untuk memperoleh pekerjaan yang lebih layak dan berupah lebih tinggi. Tingkat pendidikan yang baik menggambarkan produktivitas yang lebih tinggi, sebab individu mampu bersaing di dunia kerja berbekal pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh. Teori human capital memandang pendidikan sebagai bentuk investasi untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Individu dengan pendidikan lebih tinggi umumnya memiliki pendapatan rata-rata yang lebih besar dibandingkan mereka yang berpendidikan rendah, sehingga pendidikan membuka peluang yang lebih luas untuk memasuki dunia kerja (Mankiw, 2022).

Selain pendidikan, upah juga menjadi faktor yang dapat memengaruhi TPAK. Tingkat upah di tempat kerja sangat penting bagi keputusan seseorang untuk bekerja. Dari sisi penawaran tenaga kerja, upah merupakan variabel yang memberi dorongan, karena kenaikan upah yang ditawarkan akan mendorong bertambahnya tenaga kerja yang bersedia masuk ke pasar kerja atau terlibat dalam kegiatan ekonomi. Sebaliknya, upah yang rendah cenderung menghasilkan tenaga kerja yang kurang berkualitas, sedangkan upah yang lebih tinggi dapat mendorong peningkatan kualitas melalui motivasi, produktivitas, dan pengembangan kemampuan (Hardiani dkk., 2020).

Faktor lain yang memengaruhi perubahan TPAK adalah pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan biasanya ditandai dengan meningkatnya produksi. Ketika nilai produk regional bruto naik, hampir semua kegiatan ekonomi akan mengalami peningkatan penjualan sehingga perusahaan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Semakin besar output yang dihasilkan, semakin besar pula peluang untuk menyerap tenaga kerja baru (Nadhilla, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari peningkatan kesempatan kerja, sebab faktor produksi tenaga kerja memegang peranan penting dalam proses pertumbuhan. Penurunan angka pengangguran umumnya berjalan seiring dengan menguatnya pertumbuhan ekonomi.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menjadi faktor penting yang berkaitan dengan perubahan TPAK karena menggambarkan kualitas sumber daya manusia dari sisi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Peningkatan IPM umumnya mencerminkan perbaikan tingkat pendidikan dan derajat kesehatan, sehingga lebih banyak penduduk yang memiliki kapasitas untuk masuk ke pasar

kerja secara produktif (Todaro & Smith, 2020). Di wilayah dengan IPM yang lebih tinggi, penduduk cenderung memiliki keterampilan dan kompetensi yang lebih baik, sehingga peluang untuk terserap dalam lapangan kerja formal maupun informal semakin besar. Dengan demikian, peningkatan IPM tidak hanya menunjukkan kualitas hidup yang lebih baik, tetapi juga berpotensi mendorong kenaikan TPAK melalui bertambahnya jumlah penduduk yang siap dan mampu bekerja.

Sejumlah penelitian juga menunjukkan temuan yang sejalan dengan hubungan antara TPAK dan faktor-faktor tersebut. Penelitian (Nuraisyah Lubis, 2020) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi dan Upah Minimum Provinsi berpengaruh positif terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Sumatera Barat. Sementara itu, penelitian (Rukmana, 2020) menunjukkan bahwa jumlah penduduk menurut umur, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap TPAK, sedangkan Upah Minimum Provinsi memberikan pengaruh negatif terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di beberapa provinsi di Indonesia pada periode 2008–2017.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, peningkatan TPAK tidak dapat dipisahkan dari berbagai faktor pendukung seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat upah, pendidikan, dan Indeks Pembangunan Manusia. Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauh mana faktor-faktor tersebut memengaruhi TPAK di Provinsi DKI Jakarta, penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Determinasi Faktor-Faktor Penentu Penyerapan Tenaga Kerja di Wilayah DKI Jakarta”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Wilayah DKI Jakarta?
2. Apakah terdapat pengaruh antara Upah Minimum Provinsi dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Wilayah DKI Jakarta?
3. Apakah terdapat pengaruh antara Rata-rata Lama Sekolah dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Wilayah DKI Jakarta?
4. Apakah terdapat pengaruh antara Indeks Pembangunan Manusia dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Wilayah DKI Jakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Terdapat beberapa tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Wilayah DKI Jakarta.
2. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Wilayah DKI Jakarta.
3. Untuk mengetahui pengaruh Rata-rata Lama Sekolah terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Wilayah DKI Jakarta.
4. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Wilayah DKI Jakarta.

1.4 Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang, disimpulkan ruang lingkup dari penelitian ini ialah:

1. Ruang lingkup penelitian ini meliputi tingkat kota administrasi di DKI Jakarta yaitu Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara.
2. Kegiatan pengambilan data pertumbuhan ekonomi, Umpah Minimum Provinsi (UMP), rata-rata lama sekolah, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui *Website* Badan Pusat Statistik (BPS)

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam riset ini diharapkan bisa menghasilkan manfaat sebagai berikut:

1. Kepada pembaca, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai rujukan dalam penelitian selanjutnya guna memperkaya kajian dan pengetahuan mengenai isu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.
2. Kepada pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Kementerian Ketenagakerjaan dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan upaya peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.
3. Kepada penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, sekaligus memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di UPN “Veteran” Jawa Timur.
4. Kepada akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya koleksi referensi ilmiah pada perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN “Veteran” Jawa Timur.